

TRANSFORMASI DAN PENGARUH KEBIJAKAN PENDIDIKAN PADA MASA ORDE BARU DI INDONESIA

Siti Fathiya Dwi Utami¹, M.Ridam NurAryadi², M.Fathin Fawwaz Almauqy³

Universital Sultan Ageng Tirtayasa
Email: fathiyadwi.utami03@gmail.com

Abstrak

Pendidikan pada masa Orde Baru di Indonesia (1968-1998) mengalami transformasi signifikan dalam bentuk kebijakan pendidikan yang terpusat dan sentralistik. Pemerintahan Orde Baru, dipimpin oleh Presiden Soeharto, memandang pendidikan sebagai alat utama untuk memajukan pembangunan ekonomi nasional dan stabilitas nasional. Kebijakan pendidikan ini dilakukan dengan mengintegrasikan pendidikan pancasila, agama, dan kewarganegaraan, serta menggunakan kurikulum yang lebih efektif dan efisien berdasarkan MBO (Management by Objective). Pada masa Orde Baru, pendidikan dijalankan secara otoriter dan birokratis, dengan fokus pada pengembangan ekonomi nasional. Kurikulum 1968 berisi kelompok pembinaan pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus, sedangkan Kurikulum 1975 ditekankan agar lebih efektif dan efisien. Kurikulum 1984 mengusung "process skill approach" yang lebih berarti dalam penerapan pendidikan. Kebijakan pendidikan Orde Baru memiliki beberapa kelebihan, seperti meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar. Namun, kebijakan ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti penyeragaman kurikulum dan metode mengajar yang tidak memungkinkan kreativitas dan inovasi. Kualitas pendidikan guru juga masih rendah, walaupun jumlah guru terus meningkat. Dalam kajian ini, kita akan mengkaji transformasi dan pengaruh kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru di Indonesia, serta analisis kelebihan dan kekurangan kebijakan tersebut. Kita juga akan meneliti bagaimana kebijakan pendidikan Orde Baru mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia dan bagaimana kebijakan tersebut dapat diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan.

Kata Kunci: Kebijakan, Orde baru, Pendidikan

Abstract

Education during the New Order era in Indonesia (1968-1998) experienced a significant transformation in the form of centralized and centralized education policies. The New Order government, led by President Soeharto, viewed education as the main tool for advancing national economic development and national stability. This education policy is carried out by integrating Pancasila, religion and citizenship education, as well as using a more effective and efficient curriculum based on MBO (Management by Objective). During the New Order, education was run in an authoritarian and bureaucratic manner, with a focus on national economic development. The 1968 Curriculum contained Pancasila development groups, basic knowledge and special skills, while the 1975 Curriculum emphasized being more effective and efficient. The 1984 curriculum carries a "process skills approach" which is more meaningful in the application of education. The New Order education policy had several advantages, such as improving the quality of education and increasing student participation in the learning process. However, this policy also has several shortcomings, such as uniformity of curriculum and teaching methods that do not allow creativity and innovation. The quality of teacher education is also still low, even though the number of teachers continues to increase. In this study, we will examine the transformation and influence of education policy during the New Order in Indonesia, as well as analyze the advantages and disadvantages of this policy. We will also examine how New Order education policies influenced the development of education in Indonesia and how these policies can be improved to improve the quality of education in the future.

Keywords: Policy, New Order, Education

A. Pendahuluan

Sesudah PKI berhasil ditumpaskan, pemerintahan Orde Baru yang dikepalai oleh Presiden Suharto terus mengadakan pembaruan serta pembangunan di seluruh bidang termasuk pendidikan. Ketetapan MPRS Nomor: XXVII/Tap/MPRS/1966 yang berisi tujuan pendidikan merupakan untuk melahirkan manusia Pancasila sejati bersumber pada ketentuan-ketentuan yang dikehendaki dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dipikirkan usaha-usaha pembaharuan pendidikan. Semenjak tahun 1959, Indonesia terletak di dasar gelora manipol (manifesto Politik) USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, serta KarakterIndonesia). Manipol-USdek sebagai “dewa” dalam kehidupan politik serta seluruh bidang kehidupan termasuk di dalam bidang pendidikan. Keputusan Presiden Nomor 145 tahun 1965, tujuan nasional pendidikan era Orde Lama cocok dengan manipol-USDEK. Tujuan pendidikan yang diterapkan ialah Panca Wardana (5 pokok perkembangan). Tujuan pendidikan ini tidak berlangsung lama serta ditinggalkan sesudah meletusnya kejadian Gram 30/S/PKI pada tahun 1965 (Abdullah, 2011).

Masyarakat mulai sadar bahwa terdapat maksud politik PKI yang tercantum dalam tujuan pendidikan tersebut dengan menggunakan Pancasila selaku tamengnya. Dikeluarkannya ketetapan MPRS Nomor: XXVII tahun 1966 menghapus Keputusan Presiden No 145 tahun 1965 serta Penetapan Presiden No 19 tahun 1965 tentang pokok sistem pendidikan nasional Pancasila dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada akhir 1965 penumpasan PKI sukses dilakukan oleh ABRI dengan rakyat, akan tetapi politik PKI belum lenyap disebabkan tidak dibubarkan oleh pemerintah (Presiden). Rasa tidak puas dari masyarakat atas kurang tegasnya Presiden Sukarno hingga terjalin demonstrasi berkelanjutan menuntut tritura yang isinya merupakan pelarangan politik PKI di Indonesia yang berdampak pengeluaran Supersemar 11 Maret 1966. Pada tahun 1966 terjadi dualisme kepemimpinan antara Suharto serta Sukarno. Keluarnya TAP MPR Nomor: XIII/MPRS/1966 pada 25 Juli 1966 yang mengangkuht Suharto buat membentuk kabinet baru, sebaliknya presiden memegang kekuasaan pemerintahan serta kepala negeri. Sukarno selaku kepala negeri serta Suharto selaku kepala negeri yang berjalan rusuh, MPRS melaksanakan persidangan istimewa bertepatan pada 7-12 Maret 1967 yang menghasilkan Ketetapan Nomor: XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan negeri serta pemerintahan Presiden Sukarno dan mengangkuht Suharto selaku presiden (Syaharuddin dan Susanto, 2019; Zuhdi, dkk., 2018).

Hasil pendidikan yang kita nikmati saat inintentu merupakan kelanjutan dari proses pendidikanpada masa lalu. Berbagai persoalan dalam bidang pendidikan menjadi tantangan bagi para pemangku kebijakan, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Persoalan yang terjadi bukan saja soal kualitas dan kuantitas pendidikan, tetapi juga menyangkut kepentingan-kepentingan elit birokrasi dan elit pendidikan di negeri ini. Dikutip dari Mukodi,(2016), bahwa pendidikan selalu berpaut pada politik kepemimpinan (leadership) yang berkuasa. Dengan demikian, peletakkan dasar-dasar pendidikan oleh suatu rezim pemerintahan pada hakikatnya berpangkal pada perpolitikan suatu bangsa. Demikian juga arah dan tujuan Pendidikan nasional di Indonesia selalu dinamis dan adaptifsesuai dengan kepentingan penguasa. Sejarah menunjukkan bahwasannya dunia pendidikan di Indonesia dari satu rezim ke rezim selanjutnya penuh dengan dinamika dan persolan. Di antaranya adalah persoalan konsep dan arah pendidikan, ketidak jelasan kebijakan dan sistem yang melingkupinya serta buruknya metode dan evaluasi pengajaran (Mukodi, 2016). Hal ini berdampak pula pada output dan outcome yang dihasilkan dari sistem pendidikan tersebut.

Pendidikan adalah memanusiakan manusia muda. Jadi pendidikan tersebut dilakukan oleh manusia (dewasa) dengan upaya yang sungguh-sungguh serta

strategi dan siasat yang tepat demi keberhasilan pendidikan tersebut. Pelaksanaan pendidikan berlangsung dalam keluarga sebagai pendidikan informal, di sekolah sebagai pendidikan formal dan di masyarakat sebagai pendidikan nonformal serta berlangsung seumur hidup. Penyelenggaraan pendidikan, selain dilakukan oleh masyarakat sendiri, juga dilakukan oleh pemerintah, atau sekurang-kurangnya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pendidikan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah ini pada akhirnya terjadi proses saling mempengaruhi. Dari satu sisi situasi pemerintahan dipengaruhi oleh corak dari lulusan pendidikan, dan pada sisi lain pemerintah juga mempengaruhi dunia pendidikan. Corak pendidikan, arah dan tujuannya selanjutnya ditentukan oleh corak politik yang ditentukan oleh pemerintah.

Rezim orde baru adalah suatu periode pemerintahan yang dipimpin oleh presiden Soeharto berlangsung dari tahun 1966 hingga bulan Mei 1998. Orde baru merupakan periode pemerintahan terpanjang sejak berdirinya Negara kesatuan republik Indonesia sampai saat ini. Menurut Hadi & Kasuma, (2012) rezim orde baru berhasil memperoleh legitimasi kekuasaan dengan berbagai cara, diantaranya melalui jalan propaganda pembangunan. Menurut Kurniawati, (2017), rezim orde baru memandang dirinya sebagai rezim akhir yang menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran. Hal itu terlihat jelas dalam buku sejarah nasional jilid keenam yang menampilkan peran Soeharto dalam menyelamatkan negara dan keberhasilannya membangun sebuah pemerintahan baru yang stabil dan berorientasi pada pembangunan. Sejalan dengan itu, Tilaar dalam (Mukodi, 2016) berpandangan bahwa orde baru menandakan lahirnya suatu orde pembangunan yang ingin membawa bangsa dan masyarakat Indonesia menuju suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Menurut Mohamad Ali dalam Sugiyono et al., (2017), target minimal pembangunan pendidikan zaman orde baru adalah terbentuknya pengetahuan dan kemampudasar seperti membaca, menulis, berhitung dan penggunaan bahasa Indonesia. Akan tetapi, peran strategis pendidikan cukup disadari oleh pemerintah orde baru (Soeharto) sehingga pendidikan tidak sepenuhnya dijalankan dengan tujuan murni untuk mencerdaskan bangsa. Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan lebih berorientasi untuk mendukung sektor ekonomi yang menjadi focus utama pembangunan kala itu (Rajab, 2022). Sejak saat itu pendidikan digunakan sebagai kendaraan politik bagi pemerintah Soeharto untuk melakukan indoktrinasi terhadap rakyat Indonesia untuk melanggengkan kekuasaannya.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, metode sejarah (Sjamsudin, 2012). Metode sejarah dapat dikatakan suatu proses mengkaji, menganalisa dan membaca secara kritis redaksional buku teks dan mengaitkan dengan kondisi masyarakat pada tahun berlangsungnya kurikulum 1975. Penggunaan metode historis dalam penulisan artikel ini dilakukan melalui 4 tahap penelitian, yaitu: (1) Heuristik, menghimpun bahan-bahan atau sumber melalui studi kepustakaan, (2) Kritik sumber, menyeleksi data-data yang telah terkumpul melalui kritik intern dan kritik ekstern, (3) Interpretasi (4) Historiografi. Topik dalam pembuatan artikel ini sudah ditentukan oleh ibu/bapak dosen mata kuliah "sejarah pendidikan" sedangkan sistematika berikutnya mulai dari pembuatan judul, abstrak, inti, pendahuluan hingga pembahasan menggunakan literatur baca mulai dari e-book, jurnal, artikel, makalah, laporan penelitian terdahulu, karya ilmiah, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lainnya. Dalam pembuatan artikel juga terdapat sistem mengumpulkan informasi yang terpercaya (relevan) dengan topik yang sudah ditentukan dari pembahasan sebelumnya.

C. Pembahasan

Masa Orde Baru di Indonesia (1966-1998) merupakan periode penting dalam sejarah pendidikan nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki sistem pendidikan, dengan tujuan mendukung pembangunan ekonomi, politik, dan sosial negara. Kajian ini akan membahas transformasi kebijakan pendidikan pada masa tersebut, menganalisis kelebihan dan kekurangannya, serta melihat dampak kebijakan ini terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Selain itu, kita akan mengeksplorasi cara-cara untuk memperbaiki kebijakan pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan.

Transformasi Kebijakan

Permasalahan yang dihadapi pemerintah Orde Baru dalam bidang pendidikan di antaranya adalah masalah pemerataan, peningkatan kualitas, efektifitas dan efisiensi, dan relevansi pendidikan dengan pembangunan nasional. Keempat permasalahan ini oleh pemerintah Orde Baru ditangani dan diselesaikan dengan berbagai upaya yang selanjutnya dikenal dengan kebijakan pendidikan.

Kebijakan pendidikan tersebut adalah *pertama*, melanjutkan program pemberantasan buta huruf yang pada tahun 1972 dikembangkan lebih lanjut dengan memberikan keterampilan tertentu; *kedua*, melaksanakan pendidikan masyarakat agar memiliki kemampuan mental, spiritual, serta keterampilan; *ketiga*, mengenalkan pendidikan luar sekolah yang berorientasi kepada hal-hal penting yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya sebagai kebutuhan praktis; *keempat*, mengenalkan kegiatan inovasi pendidikan, misalnya Kuliah Kerja Nyata (KKN), dibukanya sekolah dan universitas terbuka, wajib belajar, dan sebagainya; *kelima*, pembinaan generasi muda melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Organisasi Mahasiswa Kampus, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), atau organisasi kepemudaan lainnya; keenam, dilaksanakannya program orang tua asuh mulai tahun 1984.

Kebijakan pendidikan pemerintah Orde Baru semakin jelas terlihat ketika dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Seluruh sistem pendidikan yang ada di Indonesia harus mengacu kepada undang-undang tersebut, bagaimanapun bentuk dan kondisinya.

Upaya-upaya di atas merupakan kebijakan pendidikan pemerintah Orde Baru yang dicanangkan secara nasional. Namun demikian, dalam realisasinya kebijakan pendidikan tersebut mengarahkan pada satu tujuan untuk memperkuat hegemoni pemerintah Orde Baru di hadapan masyarakat.²⁰ Alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sangat minim dalam bidang pendidikan menjadikan pendidikan sebagai sektor yang sangat lemah dan terasa sulit untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Meskipun sudah diatur dalam Pasal 36 UUSPN No. 2 Tahun 1989 tersebut, tetapi tidak mampu memberi solusi yang konkrit terhadap persoalan dalam bidang pendidikan.

Pengaruh Kebijakan Pendidikan Pada Masa Orde Baru Di Indonesia

Perubahan pendidikan dari masa ke masa mengalami peningkatan yang sangat baik pada Orde Baru juga perubahan itu terlihat mulai dari perubahan kurikulumnya, sistem pendidikannya dan bahkan untuk menentukan kelulusannya pun berubah bukan berdasarkan nilai Ujian Nasional bahkan pada masa Orde Baru ini pemerintah mewajibkan anak-anak berusia 7-12 tahun untuk mengenyam pendidikan Sekolah Dasar biasa disebut sebagai wajib belajar 6 tahun. Disamping itu ada dampak negatifnya juga pada pendidikan Orde Baru ini dikarenakan

sistem pemerintahanya otoriter sehinggapaham Orde Baru yang membuat kita khawatir buat melangkah lebih maju.

Dengan demikian, pendidikan pada masa Orde Baru bukan untuk tingkatkan taraf kehidupan rakyat, terlebih buat tingkatkan sumber energi manusia Indonesia, namun malah mengutamakan orientasi politik supaya seluruh rakyat itu senantiasa patuh pada tiap kebijakan pemerintah. Jika putusan pemerintah merupakan putusan yang adil dan tidak boleh dilanggar. Seperti itu doktrin Orde Baru pada sistem pendidikan kita. Indoktrinisasi pada masa kekuasaan Soeharto ditanamkan dari jenjang sekolah dasar hingga pada tingkatan pendidikan tinggi, pendidikan yang sepatutnya memiliki kebebasan dalam pemikiran. Pada masa itu, pendidikan difokuskan pada pengembangan militerisme yang militan sesuai dengan tuntutan kehidupan suasana perang dingin. Seluruhnya serba kaku serta berjalan dalam sistem yang otoriter.

Secara umum tujuan pendidikan sudah ditanyakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XII pasal 31:a).Masing-masing penduduk negeri berhak mendapat pengajaran; b). Pemerintah mengusahakan serta menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.Perihal tersebut kemudian dikuatkan dalam pasal 4 ketetapan MPRS Nomor XXII/MPRS/1966 tersebut, berikutnya disebutkan tentang isi pendidikan wajib memuat:a). Mempertinggi mental, moral, budi pekerti, serta menguatkan kepercayaan beragama; b). Mempertinggi kecerdasan serta keahlian; c). Membina/mengebankkan fisik yang kuat serta sehat.

Adapun pengaruh kebijakan pendidikan pada masa orde baru di Indonesia, yaitu

:

1. Peningkatan Akses Pendidikan Pada masa Orde Baru,

Pada masa Orde Baru, salah satu tujuan utama kebijakan pendidikan adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan. Melalui program wajib belajar enam tahun yang kemudian diperluas menjadi sembilan tahun, pemerintah berusaha memastikan bahwa semua anak usia sekolah menerima pendidikan dasar. Pembangunan infrastruktur sekolah, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, secara signifikan meningkatkan jumlah sekolah dasar dan menengah, memungkinkan lebih banyak anak untuk bersekolah.

2. Perkembangan Identitas Nasional

Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah selama masa Orde Baru. Kebijakan ini dirancang untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan membentuk identitas nasional yang kuat. PMP bertujuan untuk menciptakan generasi yang memiliki loyalitas tinggi terhadap negara dan memahami nilai-nilai dasar yang dianggap penting oleh pemerintah.

3. Sentralisasi dan Standarisasi Pendidikan

Kebijakan pendidikan Orde Baru sangat terpusat, dengan kontrol yang ketat dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengambilan keputusan, penyusunan kurikulum, dan alokasi anggaran pendidikan dilakukan secara sentral. Kurikulum yang diimplementasikan di seluruh Indonesia dibuat seragam untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pendidikan yang sama, sesuai dengan visi pembangunan nasional.

4. Pengaruh Politik dalam Pendidikan

Selama masa Orde Baru, pendidikan sering kali digunakan sebagai alat propaganda oleh pemerintah. Kurikulum dan materi pelajaran diatur untuk mendukung kebijakan dan kepentingan politik pemerintah. Pendidikan menjadi sarana untuk memperkuat ideologi negara dan mengurangi potensi oposisi terhadap rezim yang berkuasa.

5. Disparitas Kualitas Pendidikan

Meskipun akses pendidikan meningkat, terdapat disparitas signifikan dalam kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antara Pulau Jawa dan daerah lainnya. Sekolah-sekolah di daerah terpencil sering kekurangan fasilitas yang memadai, sumber daya belajar, dan tenaga pengajar yang berkualitas. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di berbagai daerah.

6. Peningkatan Angka Melek Huruf

Salah satu dampak positif dari kebijakan pendidikan Orde Baru adalah peningkatan angka melek huruf di Indonesia. Dengan meningkatnya partisipasi dalam pendidikan dasar dan menengah, lebih banyak anak yang mendapatkan pendidikan formal, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat literasi nasional.

Pada masa Orde Baru di Indonesia, kebijakan pendidikan mengalami perubahan signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyebarkan akses pendidikan ke seluruh pelosok negeri. Pengaruh dari kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru ini dapat dilihat dari beberapa aspek utama:

1. Pemerataan Pendidikan:

- **Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 10 Tahun 1973:** Program ini merupakan upaya pemerataan pendidikan dengan pembangunan Sekolah Dasar (SD) secara masif di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengatasi disparitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
- **Program Wajib Belajar:** Pada tahun 1984, pemerintah mencanangkan program wajib belajar 6 tahun yang kemudian diperluas menjadi 9 tahun pada tahun 1994. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan dasar.

2. Pengembangan Kurikulum:

- Kurikulum yang diterapkan pada masa Orde Baru mengalami beberapa perubahan yang signifikan. Kurikulum 1968 dan Kurikulum 1975 menekankan pada pendidikan yang bersifat nasionalistik dan pembangunan karakter.
- Kurikulum 1984 memperkenalkan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) yang menekankan pada keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.

3. Pendidikan Kejuruan:

Pemerintah Orde Baru juga fokus pada pendidikan kejuruan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan siap kerja. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diperkuat dan dikembangkan untuk menghasilkan lulusan yang siap masuk ke dunia kerja.

4. Peningkatan Kualitas Guru:

Pelatihan dan peningkatan kualitas guru menjadi salah satu prioritas. Pemerintah melakukan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru dan mengadakan program sertifikasi guru.

5. Pendanaan dan Investasi di Bidang Pendidikan:

Pemerintah Orde Baru meningkatkan anggaran pendidikan secara signifikan untuk mendukung berbagai program dan kebijakan pendidikan. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur sekolah, pengadaan buku dan alat pembelajaran, serta peningkatan kesejahteraan guru.

Dampak dari Kebijakan Pendidikan Orde Baru:

- **Positif:**
 - Akses pendidikan menjadi lebih merata dan jumlah anak yang mendapatkan pendidikan dasar meningkat signifikan.
 - Pengembangan infrastruktur pendidikan yang lebih baik, terutama di daerah terpencil.

- Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi.
- **Negatif:**
 - Kurikulum yang terlalu padat dan fokus pada hafalan, kurang menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis.
 - Beberapa program seperti CBSA mengalami kritik karena tidak diterapkan dengan baik dan kurangnya dukungan infrastruktur yang memadai.
 - Masalah korupsi dan birokrasi dalam pelaksanaan program pendidikan yang menghambat efektivitas kebijakan.

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru memberikan fondasi penting bagi perkembangan sistem pendidikan di Indonesia, meskipun masih terdapat banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik.

KESIMPULAN

Pendidikan menjadi hal yang paling penting untuk memajukan sebuah bangsa baik dari segi pembangunannya maupun secara pemerintahannya. Orde baru sering disebut sebagai orde pembangunan atau masa pembangunan dikarenakan pada saat itu pembangunan yang merata di daerah-daerah indonesia baik itu dipelosok wilayah indonesia tidak hanya itu pertumbuhan ekonomi juga pada saat itu cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pendidikan pada masa Orde Baru terdiri dari pendidikan pancasila, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Kurikulum pada masa Orde Baru terdiri dari kurikulum 1968 berisi kelompok pembinaan pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus, penekanannya hanya dalam segi intelektual lalu ada kurikulum 1975 ditekankan agar lebih efektif dan efisien berdasarkan MBO (management by objective) selanjutnya kurikulum 1984 berisi process skill approach model CBSA (cara belajar siswa aktif) atau SAL (student active learning), kurikulum 1994 berisi muatan nasional dan muatan lokal. Jenis pendidikan pada masa Orde Baru terdiri atas pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan non formal. Jalur pendidikan pada masa Orde Baru terdapat jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Jenjang pendidikan pada masa Orde Baru terdiri dari jenjang pra sekolah, jejang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi. Sistem pendidikan pada masa Orde Baru terdapat perubahan dari Orde Lamapada pelaksanaannya kegiatan kependidikan pada era ini difungsikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional, kebijakan pendidikan semuanya terpusat, pendidikan di selenggarakan dengan otorita kekuasaan administratif birokratis dan penyeragaman kurikulum juga diikuti dengan penyeragaman metode mengajar dan sistem evaluasi, yaitu Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Pendidikan umum hendaknya tidak ditekankan hanya untuk kepentingan negara saja melainkan lebih memikirkan masa depan siswanya juga, pada Orde Baru ini pendidikan difokuskan untuk penguasa-penguasa saja seharusnya itu semua dihilangkan dan diminimalisirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (2011). Indonesia dalam Arus Sejarah. Jakarta: Ichtiar Baru Van Haove.
- Loppies, M. (2023). PENDIDIKAN ZAMAN ORDE BARU: UPAYA MELANGGENGKAN KEKUASAAN SOEHARTO. *Phinisi Integration Review*.
- Muzzamil, A. (2016). KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN DARI ORDE LAMA SAMPAI ORDE BARU (Suatu Tinjauan Historis). *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*.
- Safei. (2020). Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998). *Jurnal Humanitas*.
- Sjamsudin, Helius. 2012. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Syahrudin. (2029). Sejarah Pendidikan Indonesia (Era Pra Kolonialisme Nusantara Sampai Reformasi). *Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*.
- Susanto, Zuhdi, dkk. 2018. Sejarah Indonesia. Yogyakarta: Buku Sekolah Elektronik.